Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
DOI:10.25077/jakp | Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id |

UPAYA PENGEMBANGAN INOVASI MELALUI JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Haerana[1*], Fatmawati[1], Burhanuddin[1] Nuryanti Mustari[2]
[1]Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
[2]Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

[*]Haerana@unismuh.ac.id

Dikirim : 21/02/2022
Diterima : 11/03/2022
Terbit : 21/04/2022

Abstract

The Public Service Innovation Network is a form of cooperation in the development of public service innovations that are run between related agencies, as an effort so that all parties are connected to each other in the development of public service innovations. This research is based on qualitative research method with descriptive type. Data were collected through interviews, observation and documentation. The data validation technique uses the theory of Miles & Huberman. The results of the research show that the implementation of the South Sulawesi JIPP is well implemented, with the ability to distribute the latest information with the support of a website that was created, as a learning tool and a data center for public service innovation information, and become a center for accelerating the quality of public services in the province of South Sulawesi so that a number of Regional Apparatus Organizations have succeeded. won an award at the Public Service Innovation Competition at the National level. The Public Service Innovation Network is a stakeholder collaboration node for the success of the one agency one innovation movement so that ultimately a creative climate is created to create public service innovations in the scope.

Keywords: Service Innovation; Service Innovation Network

Pendahuluan

Para stakeholder di pemerintahan daerah menuntut adanya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun itu hanya sekedar replikasi. Inovasi menjadi alternatif pemecahan rendahnya kualitas pelayanan. Replikasi, dapat menjadi arah perubahan dari sistem kerja (Setiadi, et al.,2019).

Sejak tahun 2014, Kepmenpan & RB melalui gerakan *One Agency One Innovation*, telah

menggelar Kompetisi Inovasi layanan masyarakat. Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan Penghargaan Top 99. Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi, dan kabupaten/kota. Dari 2824 inovasi yang mendaftar, terpilih Top 99 inovasi. Inovasi terpilih terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari 5 lembaga, 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot (BPS, 2018). Gebrakan-gebrakan yang inovatif di setiap OPD mulai membentuk iklim yang kompetitif dalam pelayanan publik (Arya, 2018).

Lebih lanjut berdasarkan data inovasi Sulawesi Selatan, kurang lebih selama 3 tahun (2015-2017), kabupaten/kota yang terdata dalam Top 99 yaitu Pinrang lima inovasi, Pangkep 1 inovasi, Sinjai 1 inovasi, dan Makassar 2 inovasi. Mengapa demikian, antara lain faktor utama rendahnya partisipasi instansi dalam mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik dikarenakan belum adanya teknis *coaching* sebagai wadah berbagi informasi (Machmud, 2020) .

Kemudian di 2018, Prov Sul-Sel meningkat perolehan dalam perlombaan inovasi dimana ada 5 peraih nominasi yaitu Makassar, Luwu Utara, Pangkep, Takalar, dan Pare-pare. Di 2 tahun terakhir, pada 2019 inovasi Sulawesi Selatan hanya 1 kabupaten/kota yang dapat masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Permenpan RB No. 47 Tahun 2019 Tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yaitu Pemerintah Kota Makassar dengan judul Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan).

Dalam Permenpan & RB RI No. 89 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) merupakan simpul kerjasama antar lembaga dengan peminatan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. Wadah ini disiapkan karena data-data program inovasi wajib diumumkan dan dimanfaatkan bagi OPD lain sebagai keberlanjutan inovasi. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik mencakup kementerian/instansi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan. JIPP menjadi wadah berkumpulnya inovasi demi mewujudkan layanan berkualitas terbaik bagi masyarakat.

Biro Organisasi sebagai Admin dalam penyelenggaraan JIPP, sedangkan untuk teknis dan penyediaan sarana TIK bawah kendali Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dan sarana LAPOR!-SP4N dikontrol oleh oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan JIPP Sulsel ini yakni memfasilitasi pertukaran pengetahuan (FGD, *private visiting*, pertukaran staff, dan lainnya), peningkatan kompetensi petugas pelaksana program inovasi, pengawasan dan evaluasi atau hasil kerja para pelaksana program inovasi.

Dinamika JIPP diarahkan pada *controlling* dan evaluasi pada setiap daerah pemerintahan. Dan juga digunakan sebagai sarana percepatan inovasi pelayanan publik, meningkatkan pengetahuan pengguna layanan terhadap inovasi pelayanan publik (sosialisasi program inovasi), sebagai pengguna layanan maka akan diberikan ruang untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan program inovasi, apakah penilaiannya menyatakan bahwa inovasi yang diciptakan tidak mendatangkan perbaikan pada kualitas pelayanan yang digantikannya dan ataukah penilaiannya dapat dirasakan bermanfaat bagi masyarakat dan teruji lebih baik dari pelayanan yang sebelumnya.

Tahap berikutnya, Pengembangan Inovasi dimaksudkan untuk menjadikan inovasi yang sudah diciptakan tidak berhenti menjadi sekedar inovasi saja yang sekedar untuk diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik, tetapi ditargetkan untuk dapat berkelanjutan di masa depan dengan cara memberi ruang pada pihak lain atau OPD lain untuk dapat mereplikasinya. Pembentukan JIPP telah menjadikan tuntutan adanya keberlanjutan pada setiap program inovasi dapat diwujudkan secara bertahap dengan tentu saja harus mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan JIPP searah pada perwujudan E-Government, dimana menurut Ufi Rahmi Rozani bahwa pengembangan E-Government memerlukan ikatan relasi dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta (Rozani, Mutiasari H, & Rachmania A, 2019). Penyelenggaraan pelayanan publik akan terlaksana dengan baik jika pihak pemerintah berkomitmen untuk menyediakan payung hukum atas setiap program pelayanan yang dijalankan, sebab kebijakan pemerintah menjadi jaminan atas dilaksanakannya program tersebut (Haerana, 2021).

Untuk memperoleh informasi terkini maka harus memanfaatkan jaringan. Dokumen tentang inovasi perlu diumumkan agar dapat memotivasi dan digunakan pelaksana layanan lainnya sebagai jaminan keberlanjutan inovasi. Untuk terlaksananya percepatan replikasi inovasi dan penyebarluasan inovasi dengan memfasilitasi dalam artian antar instansi pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi, perguruan tinggi, LSM, swasta, dan lembaga lainnya dengan peminatan yang sama dalam pengembangan inovasi sebagai perbaikan kualitas layanan publik, untuk itulah ada JIPP.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka penyediaan kebutuhan layanan berupa barang, jasa dan atau layanan administratif bagi warga negara dan penduduk dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pelayanan publik menjadi isu yang paling populer jika dibandingkan dengan kebijakan di sektor lainnya, sebab kebijakan publik secara nyata diperuntukkan pada

perwujudan kesejahteraan masyarakat yang secara perundang-undangan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hal tersebut (Haerana, 2016).

Efektivitas menyangkut input dan output, maksudnya bahwa terdapat perbandingan antara target yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh (Fatimah, 2019). Siagian (Mamuaja, 2016) mengartikan efektivitas yaitu penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana secara efisien dalam upaya menghasilkan barang atas jasa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Sementara (Pasolong, 2019) efektivitas, dimaknai sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas diartikan sebagai suatu sebab dari unsur lain. Efektivitas diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai, dapat diwujudkan atau dengan kata sasaran tercapai sebab melalui rangkaian mekanisme kerja.

Pendapat lain dari Mardiasmo (Chandra, Sabijono, & Runtu, 2020) Efektivitas adalah pengukuran sukses atau gagalnya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas organisasi ditentukan oleh tingkat capaian tujuannya. Semakin besar dampak output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan yang telah direncanakan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit dalam organisasi. Dari sejumlah definisi efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian dari tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Indikator efektivitas mendeskripsikan sebaran dampak dari keluaran (output) program dalam mewujudkan target program. Untuk menakar efektivitas suatu program dapat melalui tahapan analisa indikator, yaitu ketepatan target program, sosialisasi program, tujuan program, pengawasan program (Budiani, 2007). Sementara Duncan (Duncan, R. B. 1973) efektivitas diukur melalui : a) Tercapainya tujuan adalah rangkaian proses kerja dalam meraih tujuan. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: rentang waktu dan target sasaran yang tepat, b) integrasi yaitu kemampuan organisasi bersosialisasi, fokus pada konsensus dan komunikasi dengan mitra lainnya. c) adaptasi adalah penyesuaian dengan dunia luar. Untuk mencapainya digunakan tolak ukur proses pengadaan dan rekrutmen pegawai.

Kemudian United Nations (Wati, 2019) mendefinisikan inovasi sebagai rangkaian kejadian, rangkaian proses mengkreasikan dan memperkenalkan produk dan atau jasa baru, bermanfaat, jauh lebih terjangkau dari layanan sebelumnya. Inovasi merupakan wujud kreativitas. Dan JIPP sebagai sarana inovasi tersebut sesuai pada Permenpan & RB Republik Indonesia No. 89 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. Aturan pemerintah ini wajib mendapatkan dukungan pihak berwenang. (I Alit Pramawati & Ayu Putu Sri Widnyani, 2017).

Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) adalah kolaborasi antar pihak dimana pihak yang

berkolaborasi merupakan orang-orang yang memiliki komitmen atas pengembangan inovasi. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan Inovasi merupakan ruang lingkup dari sistem kerja JIPP. JIPP diselenggarakan dengan maksud antara lain yaitu 1) menyebarluaskan data mengenai ide kreatif. 2) menjadi sarana berbagi data mengenai inovasi. 3) menjadi media atau wadah pendokumentasian inovasi. 4) Mendorong akselerasi inovasi. Target JIPP adalah bahwa di semua level pemerintahan pusat dan daerah dapat dijalankan tugas dan fungsi JIPP untuk menjamin adanya keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap sejumlah informan yaitu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Fasilitator JIPP Sul-Sel, Sub Admin JIPP Sul-Sel, Master Admin JIPP Sul-Sel, Tim Panel JIPP Sul-Sel dan Inovator Kota Makassar. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung atas rangkaian proses penyelenggaraan JIPP Provinsi Sulawesi Selatan, dan tahap dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan tahunan, data rekapan inovasi dan sejumlah artikel-artikel online yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik analisis data melalui teori dari Miles & Huberman (Salim, & Syahrum 2012), dengan cara reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

Hasil Dan Pembahasan

Website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sul-Sel adalah https://jipp.sulselprov.go.id. Di website ini tersedia semua data tentang top inovasi yang telah terimplementasikan dengan baik. Sehingga para pelaksana layanan publik dapat saling bertukar informasi tentang layanan publik guna dapat memotivasi pelaksana layanan untuk selalu kreatif menciptakan layanan baru demi kualitas layanan terbaik.

Inovasi yang diciptakan dan tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Awalnya di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan seleksi, lalu data proposal inovasi tersebut di submit ke sistem JIPP kemudian dipresentasikan oleh inovatornya dan jika berkualitas maka akan dimasukkan pada kategori Top Inovasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Database Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan terekam rangkaian informasi terkini tentang pengimplementasian inovasi tersebut. Sebagai inovator

dari satu program inovasi yang diciptakan maka harus menginput gambar dan video-video kegiatan pelaksanaan inovasi tersebut.

Inovasi yang sesuai standar dan diputuskan sebagai Top Inovasi Pelayanan publik, langkah selanjutnya adalah oleh operator kemudian akan membuatnya dalam bentuk file PDF dengan berisi informasi tentang profil inovasi, asal OPD, resume inovasi dan sejumlah foto-foto bukti kegiatan dengan harapan data tersebut dapat diunduh oleh pihak lain dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bentuk profesionalisme JIPP adalah dengan selalu melakukan pembimbingan bagi para inovator. Program One Agency One Innovation telah mengharuskan setiap instansi minimal menciptakan satu inovasi setiap tahunnya untuk itu Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memotivasi semua OPD untuk berkreasi dalam pelayanan publik.. Berinovasi sebagai upaya peningkatan kinerja ASN mempersyaratkan agar para penyelenggara pelayanan menumbuhkan potensi yang dimilikinya (Kartika, 2021).

Tabel 1 Daftar Inovasi Tersubmit ke JIPP Sulawesi Selatan

Tahun	Jumlah Inovasi
2020	100
2021	112
2022	156

Sumber: http://jipp.sulselprov.go.id/admin

Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi transformasi kinerja dalam perbaikan kualitas pelayanan dengan keberadaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. JIPP telah membentuk mekanisme kerja dalam pengelolaan inovasi pelayanan publik dengan lebih baik.

Tabel 2. Manfaat Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

No.	Sejumlah Manfaat JIPP
1.	Kemudahan pendataan Inovasi Layanan Publik, baik ditingkat kabupaten,kota maupun pada level instansi di Provinsi
2	Penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di provinsi Sulsel sudah lebih terstruktur dan dapat dikoordinasikan dengan baik
3.	Pemasukan data inovasi berbasis digital sehingga lebih cepat, tepat dan terdokumentasi dengan baik
4.	sebagai sarana memahami, sharing informasi inovasi pelayanan publik sebab semua data ada pada satu sistem
5.	Pengelolaan data berbasis online sehingga sangat sistematis dan semua pihak dapat mengakses data-data inovasi tersebut

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama partner tidak hanya membimbing inovator saja tetapi juga pada pihak yang mereplikasi inovasi. Misalnya pada inovasi dari Kabupaten Bantaeng yaitu "Bendera Saskia" kemudian direplikasi oleh Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar dan diberi penamaan inovasi "Saskia Peduli Disabilitas", ada Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan inovasi Kedungkelor direplikasi di kabupaten Sinjai dengan penamaan "Pusdongkel", dan lainnya. Semua temuan baru tersebut demi mencapai kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik diawali dengan dilakukannya sosialisasi untuk itu seluruh OPD diundang pada kegiatan tersebut. Di masa Pandemi Covid 19, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melalui aplikasi Zoom. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan bersama-sama partnernya yaitu Yayasan BaKTI, KOMPAK, LAN dan juga inovator senior bekerjasama melakukan pembimbingan kepada para pelaksana pelayanan publik baik tingkat kabupaten, kota dan tingkat provinsi Sul-Sel.

Partner kerja yang ditunjuk akan membantu dalam hal teknis maupun secara konten pada isi proposal inovasi. Partner kerja tersebut juga adalah panelis yang nantinya akan memberikan penilaian pada proposal inovasi. Dalam hal memudahkan koordinasi pada masa Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik maka dibuat grup WhatsApp dengan beranggotakan para inovator di setiap OPD.

Group WhatsApp sebagai wadah membahas tentang lomba inovasi, sharing tentang tata cara submit proposal ke Sinovik dan pembahasan seputar informasi inovasi pelayanan publik. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sumsel, kerjasama tersebut dilakukan disaat pengumuman akan dilakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik secara nasional sebagai bentuk pengadaan server.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan permintaan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian membuatkan akun admin atau operator inovasi. Saat sudah dapat akun, lalu semua inovator dengan username dan passwordnya dapat login ke website JIPP. Satu inovator bisa input maksimal 10 inovasi. Semua data yang diinput akan secara otomatis tersave ke sistem sehingga sangat penting agar operator melengkapi data pada form sebab jika tidak lengkap maka sistem akan menolak, dan hal yang penting lainnya juga adalah saat memberikan pembobotan nilai pada setiap indikator penilaian.

Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan hasil data inovasi tersebut ke kelompok panelis sebagai dasar penilaian dalam proses seleksi yang sangat kompleks, mulai dari seleksi

dokumen/administrasi, presentasi proposal inovasi, hingga verifikasi lapangan. Setelah diputuskan top inovasi pelayanan publik lalu operator submit inovasi kabupaten, kota maupun provinsi Sulawesi Selatan ke dalam fitur penyimpanan yang terhubung dengan sejumlah data terkait misalnya lokasi keberadaan inovasi, dan semua data-data inovasi tersebut dapat diunduh. Sehingga pengguna layanan atau pihak lain dapat memahami inovasi tersebut sehingga akhirnya dapat memberikan saran dan kritik atas inovasi tersebut.

Agar pelayanan publik dapat tetap berjalan di masa pandemi covid-19 maka para inovator harus mampu beradaptasi dengan situasi tersebut dengan cara menciptakan inovasi terkait pembatasan penyebaran Covid 19, penerapan prokes, menciptakan layanan online. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan partner kerjanya merancang video tutorial teknik submit proposal inovasi ke website JIPP Sulawesi Selatan, dengan harapan para inovator tidak menghadapi hambatan dalam memasukkan data inovasi ke sistem JIPP. Selain itu, upaya lainnya juga dilakukan dengan pembimbingan mulai dari awal penyusunan proposal inovasi sampai pada akhirnya proposal inovasi tersebut layak untuk di submit ke website JIPP.

Dalam upaya pengembangan sistem, maka diciptakan fitur baru pada website JIPP yaitu fitur "Replikasi Inovasi". Dimana dimaksudkan sebagai bentuk pemisahan antara data-data inovasi baru dengan inovasi yang merupakan hasil replikasi, hal ini dilakukan mengingat jumlah inovasi yang masuk ke sistem sudah sangat banyak. Replikasi inovasi menjadi sangat penting sebab sebagai bukti adanya bentuk keberlanjutan dari inovasi yang sudah diciptakan sehingga sebuah inovasi dapat benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat. D Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan tim terus mengupayakan terjadinya replikasi di daerah lain atas inovasi yang sudah diciptakan sebelumnya. Sehingga tentu saja hal ini memberikan ruang terbuka bagi pihak lain yang berkomitmen untuk mereplikasi inovasi-inovasi yang secara nyata sudah teruji manfaatnya. Fitur replikasi inovasi di website JIPP Sulsel juga dapat disertakan pada Kompetisi inovasi pelayanan publik di level Provinsi Sul-Sel dengan tentu saja tahapan seleksinya akan berbeda dengan KIPP tingkat nasional

Penutup

Keberadaan Jaringan inovasi Pelayanan Publik dapat dikategorikan cukup membantu dalam upaya pengembangan inovasi. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sulsel pada dasarnya telah mencapai tujuan dari pembentukannya. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2018, JIPP sudah

menjadi ajang sharing data terkini tentang inovasi-inovasi bagi para inovator. JIPP Sulsel adalah wadah berbagi pengalaman sebagai pelaksana inovasi serta sebagai pengguna layanan, JIPP dapat diakses di : https://jipp.sulselprov.go.id/ .

Gerakan *One Agency One Innovation* telah mendorong pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik dan keberadaan JIPP menjadikan gerakan tersebut lebih terkoordinasi dan sistematis. Dimana langkah awalnya adalah dilakukannya sosialisasi kompetisi kepada seluruh OPD di level Provinsi Sul-Sel, dan selanjutnya dilaksanakan pembimbingan terhadap para inovator dalam penyusunan proposal inovasinya, sampai pada submit proposal tersebut ke website JIPP.

JIPP Sulsel dapat menyesuaikan diri di masa pandemic covid 19, dengan melakukan pembimbingan melalui aplikasi zoom dan melakukan koordinasi melalui Group WhatsApp. Sebagai bentuk pembimbingan yang baik maka diciptakan video tutorial tentang teknik submit proposal ke website JIPP sebagai upaya memudahkan para inovator untuk upload proposal. Kemudian pembuatan fitur baru di website JIPP "Replikasi Inovasi", Secara umum replikasi inovasi sebagai wujud dari upaya keberlanjutan inovasi sehingga diharapkan inovasi yang sudah diciptakan dan secara nyata dapat bermanfaat bagi masyarakat maka dapat dikembangkan untuk tetap eksis dalam pengimplementasiannya.

Daftar Pustaka

Arya, F. A. (2018). " AJEP " : Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik Farras Alfino Arya Undang- inovasi berupa pembaharuan dalam Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan publik. III(3), 239–249. Retrieved from http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/34/29

Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 15(3), 290. https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020

Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 4(2), 137–156. https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019

Haerana. (2016). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 1. https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2475

Haerana. (2021). Dinamika Administrasi Publik (I; R. N. Revisa, Ed.). Retrieved from

https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=106792

I Alit Pramawati, A. A., & Ayu Putu Sri Widnyani, I. (2017). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. JAKP) Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 3(April), 205–225.

Kartika, R. S. (2021). Kinerja ASN Dalam Menghadapi Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 6(1), 20–41. https://doi.org/10.25077/jakp.6.1.20-41.2021

Machmud, F. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Bukti Hadir Pemerintah. Sulawesi Selatan: BattiNews.

Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal EMBA, 4(1), 165–171.

Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik (9th ed.). Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. (n.d.).

Redhi Setiadi, Elke Rapp, G. F. (2019). Peran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur dalam Menumbuhkembangkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik. The Governance Brief, (37), 1–17.

Rozani, U. R., Mutiasari H, A., & Rachmania A, N. R. A. (2019). Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Surabaya Melalui Program E-LAMPID Ditinjau Dari Perspektif Electronic Government. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 2(3), 255–263. https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.255-263.2017

Salim & Syahrum. (2012). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan. Bandung: Citra Pustaka, Media.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (n.d.).

Wati, S. (2019). Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Er- Usip (Elektronik Retribusi Pasar) Di Dinas Perindagkop-Ukm Kabupaten Bangka Tengah Public Service Innovation Implementation Through Er-Usip (Elektronik Retribusi Pasar) at the Department of Perindagkop. Jurnal Inspirasi, 10(2), 115–120.